

Judul : Minyak dunia bergejolak, DPR harap pasokan energi tetap aman
Tanggal : Kamis, 17 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Minyak Dunia Bergejolak

DPR Harap Pasokan Energi Tetap Aman

SENAYAN menyoroti naiknya harga minyak dunia yang menembus angka 100 dolar AS per barel di tengah perang antara Iran dan Amerika Serikat (AS) yang tak kunjung usai. Kenaikan tersebut berpotensi melambungkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, khususnya Pertamina dengan potensi menembus angka Rp 18-20 ribu per liter.

Anggota Komisi VI DPR Dewi Juliani meminta Pemerintah dan Pertamina segera menyiapkan langkah mitigasi agar gejolak harga minyak dunia tidak berujung pada tekanan baru terhadap masyarakat. Jangan sampai tekanan energi global berubah menjadi beban baru bagi masyarakat.

"Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan ada strategi yang kuat agar dampaknya tidak langsung dibebankan kepada konsumen," harap Dewi di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Sebelumnya, Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menyampaikan, harga BBM nonsubsidi seperti Pertamina dan Dexlite berpotensi terdampak apabila harga minyak dunia tidak kembali ke kisaran 60 dolar AS sampai 70 dolar AS per barel. "Kita doakan semoga itu (harga minyak turun) bisa terjadi, kalau tidak kondisinya akan berdampak seperti sekarang harga Pertamina itu akan berkisa-

ran antara di atas Rp18 ribu - Rp20 ribu per liter," kata Eko di Jakarta, Minggu (13/9/2026).

Dewi melanjutkan, tekanan terhadap harga energi global perlu diantisipasi mengingat harga minyak mentah Brent dalam beberapa hari terakhir telah menembus 100 dolar AS per barel. Kondisi tersebut terjadi di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah dan gangguan terhadap jalur distribusi minyak.

Pemerintah, kata Dewi, memang tidak dapat mengendalikan konflik geopolitik maupun harga minyak internasional. Namun, Pemerintah memiliki instrumen kebijakan untuk mengelola dampak gejolak global tersebut agar tidak sepenuhnya dirasakan di dalam negeri. "Jangan sampai masyarakat menanggung seluruh tekanan akibat situasi global tersebut," kata politisi PDIP ini.

Karena itu, Dewi meminta Pemerintah dan Pertamina memastikan pasokan energi tetap aman sekaligus melakukan efisiensi dan mencari ruang penghematan untuk menekan potensi kenaikan harga. Sehingga tekanan biaya akibat kenaikan minyak dunia tidak seluruhnya dialihkan kepada masyarakat.

"Kami juga mendorong pengawasan distribusi BBM diperkuat dan seluruh komponen pembentukan harga dilakukan secara transparan," imbuah legislator asal Riau ini.

Dewi menambahkan, kenaikan



Dewi Juliani

harga BBM dapat menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian. Selain meningkatkan beban pengguna kendaraan, kenaikan harga BBM juga berpotensi mendorong kenaikan biaya transportasi dan logistik yang kemudian berimbas pada harga berbagai kebutuhan masyarakat.

Anggota Komisi XII DPR Ramson Siagian menambahkan, ketersediaan BBM nasional dalam kondisi aman dengan tingkat ketahanan rata-rata sekitar 17-18 hari. Karena itu, persoalan kelangkaan dan antrian panjang BBM yang sempat terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel) bukan disebabkan oleh keterbatasan stok nasional.

Dia menyebut, masalah itu lebih dipengaruhi oleh kendala

distribusi serta peningkatan permintaan terhadap jenis BBM tertentu. "Tapi hari ini (kemarin) sudah membaik, karena sudah merapat kapal yang membawa BBM di Makassar untuk region di sana," ujar Ramson di Jakarta, Rabu (16/9/2026).

Ramson menjelaskan, salah satu faktor yang menyebabkan stok BBM di sejumlah titik distribusi sempat mengalami penurunan adalah faktor keterlambatan kedatangan kapal pengangkut pasokan BBM. Juga adanya perubahan pola konsumsi masyarakat yang turut memengaruhi ketersediaan BBM bersubsidi.

"Setelah harga BBM nonsubsidi seperti Pertamina mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan harga minyak global, sebagian masyarakat beralih menggunakan BBM bersubsidi jenis Peralite," kata politisi Gerindra.

Peralihan konsumsi tersebut, kata Ramson, menyebabkan peningkatan permintaan secara tiba-tiba di sejumlah SPBU sehingga stok Peralite lebih cepat berkurang sebelum pasokan berikutnya tersedia.

Karena itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) diminta untuk memperkuat pengawasan terhadap penyaluran BBM bersubsidi bersama Pertamina. "Pengawasan diperlukan agar Peralite benar-benar diterima oleh masyarakat yang

berhak," tandasnya.

Selain itu, mengimbau masyarakat yang secara ekonomi mampu agar tetap menggunakan BBM nonsubsidi dan tidak beralih ke Peralite ketika terjadi kenaikan harga Pertamina. "Memang harganya jadi lebih tinggi karena kenaikan di pasar global," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, Pemerintah masih mempertahankan harga BBM bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan. Kebijakan tersebut ditempuh sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok menengah ke bawah.

Bahlil mengatakan, keputusan mempertahankan harga BBM subsidi dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia. "Pemerintah sampai dengan hari ini memutuskan untuk tetap menjaga harga minyak subsidi tidak ada kenaikan," kata Bahlil di Jakarta, Jumat, (11/9/26).

Menurut Bahlil, mempertahankan harga BBM bersubsidi ketika harga minyak mentah dunia berada pada level tinggi bukan keputusan yang mudah. Pasalnya, kondisi tersebut dapat meningkatkan beban anggaran subsidi yang harus ditanggung Pemerintah. ■TIF